

**ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP) DI KELURAHAN BALEPANJANG
KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan



Oleh :

DWI MARYANTO
NIM . S.4209098

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2011**

commit to user

**ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP) DI KELURAHAN BALEPANJANG
KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI**

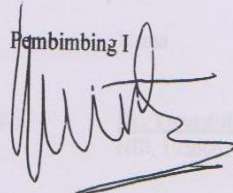
Disusun oleh :

DWI MARYANTO
S.4209098

Telah disetujui oleh Pembimbing

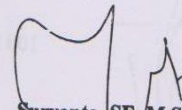
Pada tanggal : 30/03/2011

Pembimbing I



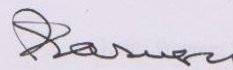
Dr. Guntur Riyanto, MSi.
NIP. 19580927 198601 1 001

Pembimbing II



Suryanto, SE, M.Si
NIP. 19750122 200812 1 012

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. JJ. Sarungu, MS.
NIP. 19510701 198010 1 001


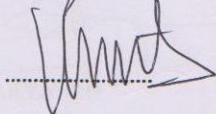
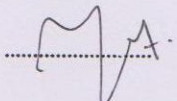
**ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI
KELURAHAN BALEPANJANG KECAMATAN JATIPURNO
KABUPATEN WONOGIRI**

Disusun oleh :

**DWI MARYANTO
S.4209098**

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Pada tanggal : 3 OKTOBER 2011

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	<u>Dr. Yunastiti P. M.P</u> NIP. 19560613 198403 2 001	
Pembimbing Utama	<u>Dr. Guntur Riyanto, M.Si</u> NIP. 19580927 198601 1 001	
Pembimbing Pendamping	<u>Suryanto, SE, M.Si</u> NIP. 19750122 200812 1 012	



Mengetahui
Direktur PPs UNS
Prof. Drs. Suranto, M.Sc., PhD
NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan


Dr. JJ. Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : DWI MARYANTO
NIM : S.4209098
Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi SDM dan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, dan sepanjang pengetahuan saya kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Surakarta, Juli 2011

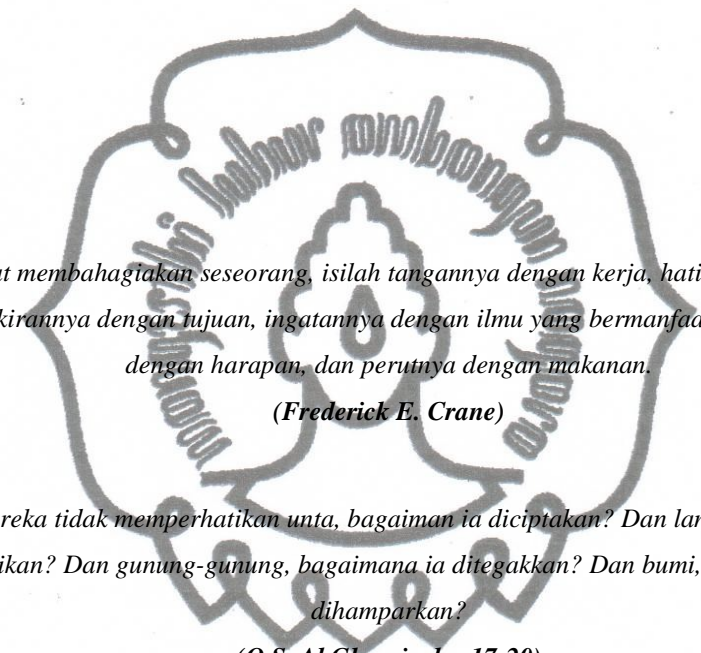


DWI MARYANTO

PERSEMBAHAN

Teruntuk :

- ❖ *Orangtuaku, istri dan anak-anaku tercinta penyemangatku dalam hidup;*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan mahasiswa Angkatan XI Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta 2009.*

MOTTO

Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan.

(Frederick E. Crane)

Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaiman ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

(Q.S. Al Ghasyiyah : 17-20)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Balepanjang (wilayah studi) dan dampaknya terhadap tingkat produksi anggota, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan usaha yang diperoleh masyarakat sebelum dan sesudah menerima dana PNPM-MP. Untuk tujuan ini dilakukan penelitian dengan populasi sebesar 35 responden penerima dana PNPM-MP anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan teknik sampling sensus yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang telah melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga kegiatan fisik, bidang ekonomi, bidang sosial dan pelatihan-pelatihan. Bidang ekonomi dalam pengelolaan dana bergulir tergabung dalam anggota UPPKS yang berjumlah 35 orang yang didominasi oleh kaum perempuan. Sebagian besar anggota berada pada usia kerja produktif (30 – 50 tahun). Sedangkan menurut tingkat pendidikan tergolong cukup tinggi yaitu sebagian besar atau 68,57% berpendidikan SLTP ke atas dan mayoritas responden memanfaatkan dana PNPM untuk mengembangkan usaha perdagangan, jasa dan home industri. Anggota UPPKS mendapatkan pinjaman dana antara Rp. 500.000,00 - Rp. 2.000.000,00 dengan besaran rata-rata pinjaman adalah Rp. 814.286,00.

Hasil analisis data ditemukan bahwa dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap anggota UPPKS sebelum dan sesudah menerima dana PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno 1) terdapat peningkatan produksi anggota yang signifikan dengan kenaikan persentase produksi rata-rata sebesar 93,68%, 2) terdapat peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja yang signifikan dengan kecenderungan penyerapan tenaga kerja baru yang meningkat dengan persentase rata-rata 23,64%, 3) terdapat peningkatan rata-rata keuntungan usaha yang signifikan dengan kenaikan keuntungan yang diterima oleh anggota UPPKS persentase rata-rata sebesar 61,09%.

Kata kunci : PNPM-MP, UPPKS dan Uji beda rata-rata.

ABSTRACT

This study aims to find a general overview of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) in the Balepanjang Village (study area) and its impact on the level of production, employment and business profits earned before and after receiving public funds PNPM-MP. For this purpose the research conducted with a population of 35 respondents grantees PNPM-MP group members of Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) with census sampling techniques that were analyzed descriptively.

The results can be seen that PNPM-MP in the Balepanjang Village been carrying out activities from planning to physical activity, economic, social and training services. Economics in the management of revolving fund incorporated in UPPKS members numbering 35 people who are dominated by women. Most members are in their productive employment (30-50 years). Meanwhile, according to education level is quite high at 68.57% of most or junior high school educated to the top and the majority of respondents utilize PNPM funds to develop the trade business, and home services industries. UPPKS members get a loan of funds between Rp. 500.000,00 - Rp. 2.000.000,00- with an average loan size is Rp.814 286,00.

The results of data analysis found that the impact of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) against members UPPKS before and after receiving the funds PNPM-MP in the Balepanjang Village District Jatipurno 1) there is a significant increase in production of the percentage increase in average production by 93,68%, 2) there is increased absorption of a significant number of workers with new employment trend that increases with the average percentage of 23,64%, 3) there is an increase in the average profit businesses with a significant increase in profits earned by the member UPPKS average percentage of 61,09%.

Keywords: PNPM-MP , UPPKS, and compare mean test.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Tesis yang berjudul : “Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri” adalah merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak bisa lepas dari bimbingan, petunjuk dan masukan Dosen Pembimbing serta dengan berpedoman pada buku pedoman dan bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Suranto, MSc., PhD selaku Direktur PPs Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dr. JJ Sarungu, MS selaku Ketua Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Guntur Riyanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, arahan dan koreksi dengan penuh kesabaran, perhatian dan tanggung jawab

commit to user

4. Suryanto, SE, M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberikan bimbingan sampai tesis ini selesai tepat waktu.
5. Kedua orang tua, istri dan anak-anakku tercinta atas segala doa dan motivasinya.
6. Semua Dosen dan staf Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Teman-teman dari berbagai pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala budi baik dan bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, Juli 2011

Penulis,

DWI MARYANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Pustaka	12
1. Kemiskinan	12
2. Pertumbuhan Penduduk	22
3. Kesejahteraan ekonomi	24
4. Konsep Laba.....	25
5. Konsep Partisipasi	34
6. Konsep Pemberdayaan	39
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	43

B. Hasil Penelitian Terdahulu	53
C. Kerangka Pemikiran	55
D. Hipotesis	57
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	58
A. Ruang Lingkup Penelitian	58
B. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data	58
C. Analisis Data	59
D. Definisi Operasional Variabel	59
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum	61
1. Kondisi Geografis dan Kependudukan	61
2. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan	63
B. Karakteristik Responden	65
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	71
1. Produksi	71
2. Tenaga Kerja	73
3. Keuntungan Usaha.....	75
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur	67
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	69
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan	70
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Besarnya Dana PNPM yang Diterima.....	71
Tabel 4.7 Persentase Produksi Sebelum dan Sesudah Penerimaan Dana PNPM.....	72
Tabel 4.8 Persentase Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Penerimaan Dana PNPM.....	73
Tabel 4.9 Persentase Keuntungan Usaha Sebelum dan Sesudah Penerimaan Dana PNPM.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	55



ABSTRAK**ANALISIS EKONOMI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN
BALEPANJANG KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI****DWI MARYANTO****S.4209098**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Balepanjang (wilayah studi) dan dampaknya terhadap tingkat produksi anggota, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan usaha yang diperoleh masyarakat sebelum dan sesudah menerima dana PNPM-MP. Untuk tujuan ini dilakukan penelitian dengan populasi sebesar 35 responden penerima dana PNPM-MP anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan teknik sampling sensus yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang telah melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga kegiatan fisik, bidang ekonomi, bidang sosial dan pelatihan-pelatihan. Bidang ekonomi dalam pengelolaan dana bergulir tergabung dalam anggota UPPKS yang berjumlah 35 orang yang didominasi oleh kaum perempuan. Sebagian besar anggota berada pada usia kerja produktif (30 – 50 tahun). Sedangkan menurut tingkat pendidikan tergolong cukup tinggi yaitu sebagian besar atau 68,57% berpendidikan SLTP ke atas dan mayoritas responden memanfaatkan dana PNPM untuk mengembangkan usaha perdagangan, jasa dan home industri. Anggota UPPKS mendapatkan pinjaman dana antara Rp. 500.000,00 - Rp. 2.000.000,00 dengan besaran rata-rata pinjaman adalah Rp. 814.286,00.

Hasil analisis data ditemukan bahwa dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap anggota UPPKS sebelum dan sesudah menerima dana PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno 1) terdapat peningkatan produksi anggota yang signifikan dengan kenaikan persentase produksi rata-rata sebesar 93,68%, 2) terdapat peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja yang signifikan dengan kecenderungan penyerapan tenaga kerja baru yang meningkat dengan persentase rata-rata 23,64%, 3) terdapat peningkatan rata-rata keuntungan usaha yang signifikan dengan kenaikan keuntungan yang diterima oleh anggota UPPKS persentase rata-rata sebesar 61,09%.

Kata kunci : PNPM-MP, UPPKS dan Uji beda rata-rata.

ABSTRACT**ECONOMIC ANALYSIS OF THE PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
IN THE BALEPANJANG VILLAGE JATIPURNO DISTRICT
WONOGIRI REGENCY****DWI MARYANTO****S.4209098**

This study aims to find a general overview of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) in the Balepanjang Village (study area) and its impact on the level of production, employment and business profits earned before and after receiving public funds PNPM-MP. For this purpose the research conducted with a population of 35 respondents grantees PNPM-MP group members of Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) with census sampling techniques that were analyzed descriptively.

The results can be seen that PNPM-MP in the Balepanjang Village been carrying out activities from planning to physical activity, economic, social and training services. Economics in the management of revolving fund incorporated in UPPKS members numbering 35 people who are dominated by women. Most members are in their productive employment (30-50 years). Meanwhile, according to education level is quite high at 68.57% of most or junior high school educated to the top and the majority of respondents utilize PNPM funds to develop the trade business, and home services industries. UPPKS members get a loan of funds between Rp. 500.000,00 - Rp. 2.000.000,00- with an average loan size is Rp.814 286,00.

The results of data analysis found that the impact of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) against members UPPKS before and after receiving the funds PNPM-MP in the Balepanjang Village District Jatipurno 1) there is a significant increase in production of the percentage increase in average production by 93,68%, 2) there is increased absorption of a significant number of workers with new employment trend that increases with the average percentage of 23,64%, 3) there is an increase in the average profit businesses with a significant increase in profits earned by the member UPPKS average percentage of 61,09%.

Keywords: PNPM-MP , UPPKS, and compare mean test.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan permasalahan pokok yang dihadapi Indonesia, terutama di daerah perdesaan. Dari data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa, mulai tahun 1996 – 2005, persentase penduduk miskin yang ada di desa relatif lebih tinggi dari persentase penduduk miskin yang ada di kota. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kesempatan berusaha dan kurangnya modal usaha sehingga masyarakat di perdesaan sulit berkembang dan sulit untuk lepas dari belenggu kemiskinan.

Masalah kemiskinan yang dihadapi, terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang memang sangatlah kompleks. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (Sumodiningrat, 1998:26). Seringkali pemikiran mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan pada segi-segi emosional atau perasaan yang diselimuti oleh

aspek moral dan kemanusiaan, ataupun masih bersifat partisan karena bersangkut paut dengan alokasi sumber daya, sehingga usaha memahami hakekat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi tidak berdaya karena terbatasnya kemampuan ekonomi sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit dikenali dan ditarik garis batas secara umum mengingat berbagai perbedaan yang melatar belakangi. Kemiskinan harus ditanggulangi, banyak teori ekonomi yang tersedia di lembaga perguruan tinggi dan riset, namun tidak semua teori itu bisa dijalankan atau dilaksanakan.

Berbagai program pengentasan kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan karitas dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai *social capital* yang ada di masyarakat (gotong-royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Lemahnya nilai-nilai *social capital* pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.

Akibat yang dialami dengan keadaan seperti ini adalah, usaha penanggulangan kemiskinan bersifat parsial, tidak komprehensif, serta hasil yang dicapai dari segala upaya penanggulangan tersebut menjadi tidak tepat sasaran (Suparlan, 1993). Untuk menanggulangi masalah kemiskinan

diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Penanggulangan kemiskinan menjadi tugas pemerintah seperti menyediakan lapangan pekerjaan, memberantas korupsi, menerapkan sistem ekonomi, menyediakan infrastruktur dan mengundang investor domestik maupun asing. Pemerintah melalui upaya terpadu yang diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi masing-masing, masyarakat jangan hanya dijadikan sebagai sebuah

obyek pembangunan tetapi juga harus dapat menjadi subyek dari pembangunan tersebut. Peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memaksimalkan tujuan pembangunan itu sendiri dan dapat mengarahkan pembangunan tepat sasaran serta menjadi kunci utama dari keberhasilan pembangunan bangsa ini.

Perubahan cara berfikir dan cara bertindak pada ukuran kecil orang per orang atau keluarga bisa berkembang dan punya dampak pada penerapan kebijakan umum yang dilakukan pemerintah. Ukuran kemiskinan bukan garis kemiskinan atau upah minimum tetapi dari penghasilan yang diperoleh cukup untuk biaya makan, kebutuhan listrik, air, transportasi, biaya sekolah, menabung dan membayar asuransi kesehatan, kendaraan dan jiwa dalam pengertian yang sederhana. Kalau kebutuhan sederhana tersebut belum mampu untuk membayarnya kita masih dalam situasi yang bisa mengancam kemiskinan. Krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah menambah jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga pada tahun 1998 Pemerintah mengucurkan dana melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini masih berada dalam program jaring pengaman sosial (*sosial safety net*) dengan menitikberatkan pada upaya pemberdayaan komunitas (*communiy empowerment*) yang relatif berbeda dengan program JPS lainnya.

Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang

menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak, sehingga garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan. Untuk Provinsi Jawa Tengah, menurut laporan Badan Pusat Statistik melalui data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) tahun 2008, batas garis kemiskinannya yaitu sebesar 181.877 rupiah (BPS, 2008).

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,57 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi

bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah. Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik (Todaro, 2004:17).

Masalah tingginya angka kemiskinan juga masih dialami oleh Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil survey tentang data dan informasi kemiskinan tahun 2009 yang dilakukan oleh Gabungan antar SKPD terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri relatif besar yaitu masih mencapai 325.598 orang (26,37%). Meskipun tidak terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, kondisi ini

masih berada di atas persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 17,72%. Sedangkan menurut Data kemiskinan Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno status 31 Desember 2009 yang bersumber dari UPTB KB PMD Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno dan sudah direvisi oleh BPS terhadap jumlah rumah tangga PPLS 08 menurut klasifikasi kemiskinan berjumlah 250 KK dengan jumlah anggota jiwa 860 yang berarti KK Miskin Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno 22% dari jumlah 1.137 KK dengan jumlah penduduk 4.000 jiwa.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia di Kabupaten Wonogiri. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran. Indikator yang paling umum digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat (perekonomian) suatu daerah adalah dengan melihat kinerja perekonomiannya. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 Kecamatan Jatipurno pada tahun 2009 sebesar 75,374 milyar rupiah, meningkat sebesar 3,596 milyar rupiah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2008) sebesar 71,778 milyar rupiah. Peningkatan PDRB di Kecamatan Jatipurno tidak terlepas dari perkembangan seluruh sektor ekonomi di Kecamatan Jatipurno tersebut.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Perkotaan, PNPM Perdesaan dan Mandiri di Wilayah khusus dan daerah tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Program PNPM-MP yang dirancang sebagai bagian dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat, dengan memberikan modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan. Program ini dirancang sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui proses kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

Pengelolaan program ini diberikan secara langsung kepada masyarakat. Dengan model pengelolaan seperti itu diharapkan kelompok masyarakat sasaran, dapat melaksanakannya secara optimal. Seluruh program seharusnya dapat dilaksanakan secara total dengan menggerakkan segala bentuk upaya dan cara yang mendukung kesuksesan program, diantaranya yang penting adalah

kejelasan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program. Bentuk-bentuk kegiatan dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno adalah pembangunan fisik sarana dan prasarana, Simpan Pinjam (SPP), dan dana bergulir yang penyaluran dananya diberikan kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam wadah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Masih tetap tingginya jumlah penduduk miskin di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno dan paling kecilnya PDRB per kapita Kecamatan Jatipurno di tahun 2009, menunjukkan masih tingginya perbedaan kesenjangan kondisi sosial ekonomi masyarakat meskipun program PNPM-MP telah berjalan beberapa tahun dengan dana yang besar.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah salah satu program nasional untuk penanggulangan kemiskinan dengan dana besar. Maka dengan asumsi jika hasil analisis program ini bisa berjalan dengan baik dan analisisnya dapat dilakukan dengan komprehensif dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah penelitian sebagai suatu karya ilmiah, maka program ini diharapkan menjadi program unggulan pemerintah kabupaten dan pusat karena sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam hal ini adalah studi kasus analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dampak PNPM-MP terhadap tingkat produksi anggota?
2. Bagaimana dampak PNPM-MP terhadap penyerapan tenaga kerja?
3. Bagaimana dampak PNPM-MP terhadap keuntungan usaha yang diperoleh anggota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak PNPM-MP terhadap tingkat produksi anggota, penyerapan tenaga kerja, dan keuntungan usaha yang diperoleh anggota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pengambil kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik dalam penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
2. Kajian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan evaluasi serta monitoring pelaksanaan pengembangan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

3. Bagi ilmu pengetahuan kajian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang menyangkut Konsep Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam rangka pengentasan kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang telah mengakar dari tahun ke tahun di Indonesia. Kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi kalangan akademisi maupun praktisi. Kemiskinan pada dasarnya adalah suatu permasalahan yang kompleks dan tidak hanya berurusan dengan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional karena berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya dan politik). Karena bersifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kesejahteraan sosial.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya (Suryawati, 2005).

Menurut Amartya dalam Bloom dan Canning (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" di mana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi : kesempatan dan

rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Menurut *World Bank*, dalam definisi kemiskinan adalah: *"the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other"* (www.worldbank.org).

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada "kualitas hidup" yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain, kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya baik secara individual maupun kolektif (Simatupang dan Dermoredjo, 2003).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan

suatu masyarakat. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

c. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

- 1) Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.

commit to user

- 2) Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Paul Spicker (2002) penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) *Individual explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
- 2) *Familial explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
- 3) *Subcultural explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
- 4) *Structural explanations*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak.

Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2004) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Ketiga aspek kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2004), yang mengatakan, "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak, sehingga garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan. Untuk

provinsi Jawa Tengah, menurut laporan Badan Pusat Statistik melalui data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) tahun 2008, batas garis kemiskinannya yaitu sebesar 181.877 rupiah (BPS, 2008).

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,57 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah. Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memasukkan masalah kemiskinan dan pengangguran serta infrastruktur dalam skala prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. Ada empat kluster program yang termasuk dalam prioritas yaitu, program bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan enam program pro rakyat. RKP 2012 tengah memuat strategi perluasan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan (dalam Tisna, 2008) adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh *commit to user* cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2011 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

- 1) Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan Iptek.
- 2) Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.
- 3) Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.

- 4) Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan perdesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

2. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Maltus (dalam Arsyad, 1999) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsiten.

Menurut Maier dalam Kuncoro (1997), bahwa dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya

perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.

- b. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.
- c. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Todaro (2004) menyatakan bahwa dalam perhitungan indeks kemiskinan dengan pengukuran indeks *Foster Greer Thorbecke* yang sering disebut juga sebagai kelas P_α dari ukuran kemiskinan yaitu dirumuskan sebagai berikut:

$$P_\alpha = \frac{1 \sum_{i=1}^N (Y_p - Y_i)^\alpha}{N}$$

Di mana Y_i adalah pendapatan dari orang miskin yang ke- i , Y_p adalah garis kemiskinan dan N adalah jumlah penduduk. Indeks P_α mempunyai bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada nilai α . Jika $\alpha = 0$, maka pembilangnya

sama dengan H, dan akan diperoleh *ratio headcount* H/N. Jika $\alpha = 1$, maka akan diperoleh jurang kemiskinan yang dinormalisasi.

Menurut Nelson dan Leibstein (dalam Sukirno, 2006) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

3. Kesejahteraan ekonomi

Tujuan dari aktifitas ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu-individu yang membentuk masyarakat, kesejahteraan individu tidak hanya tergantung pada konsumsi barang dan jasa yang tersedia, namun juga tergantung pada kuantitas dan kualitas (Friedman, 1992).

Kesejahteraan ekonomi (*welfare economics*) merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pengembangan manusia (*human development*) (Sen, 2002). Selanjutnya Sen (2002) lebih memilih *capability approach* dalam menentukan standar hidup. Sen juga mengatakan : *the freedom or commit to user*

ability to achieve desirable "functionings" is more importance than actual outcomes.

Nicholson (1992) mengemukakan prinsipnya mengenai kesejahteraan sosial yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum tercapai. Sementara itu Bornstain dalam Swasono (2003) mengajukan "*performance criteria*" untuk *social welfare* dengan batasan-batasan yang meliputi : *output, growth, efficiency, stability, security, inequality* dan *freedom*.

4. Konsep Laba

Menurut teori ekonomi keuntungan atau laba mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukuan. Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan, keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Dalam teori ekonomi definisi itu dipandang terlalu luas karena tidak mempertimbangkan ongkos yang tersembunyi, yaitu ongkos produksi yang tidak dibayar dengan uang tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari ongkos produksi (Sukirno, 2000). Menurut Salvatore (1994) bahwa, Keuntungan Total = Penerimaan Total (TR) dikurangi dengan Biaya Total (TC). Keuntungan total mencapai maksimum apabila selisih positif antara TR dan TC mencapai angka terbesar.

Menurut Abdullah (1987) laba pengusaha adalah : Selisih antara hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya seperti rente tanah, upah buruh,

bunga modal, bahan-bahan yang dipakai ditambah dengan penghapusan atas alat-alat modal tetap. Jadi laba atau keuntungan usaha bagi pengusaha adalah merupakan pendapatan bersih dari usaha yang dilakukannya. Menurut Rahardja dan Manurung (2002) dalam teori ekonomi mikro tujuan perusahaan adalah mencari laba (*profit*). Secara teoritis laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Jika laba dinotasikan π , pendapatan atau penerimaan total sebagai TR dan biaya total adalah TC maka :

$$\Pi = TR - TC \dots\dots\dots (1)$$

Perusahaan dikatakan memperoleh laba kalau nilai Π positif ($\Pi > 0$) di mana $TR > TC$. Laba maksimum (*maximum profit*) tercapai apabila nilai Π mencapai maksimum.

a. Analisis Usaha

Analisis usaha merupakan pendekatan yang sangat penting bagi suatu usaha komersil. Melalui hasil analisis ini dapat dicari langkah pemecahan berbagai kendala yang dihadapi. Analisis usaha bertujuan mencari titik tolak untuk memperbaiki hasil dari usaha tersebut. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk merencanakan perluasan usaha baik menambah cabang usaha atau memperbesar skala usaha. Analisis usaha dimaksudkan untuk mengetahui kinerja usaha secara menyeluruh. Ada tiga laporan utama yang

berkaitan dengan analisis usaha yaitu : (1) *cash flow* (arus biaya dan penerimaan), (2) neraca (*balance sheet*), (3) pertelaan pendapatan (*income statement*) (Kwartono, 2007). Pendapatan (*income statement*) lebih menunjukkan kepada sumber-sumber penerimaan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai penerimaan tersebut. Berdasarkan data tersebut dapat diukur keuntungan usaha dan tersedianya dana riil untuk periode selanjutnya.

b. Pendapatan Usaha

Analisis pendapatan berfungsi untuk mengukur berhasil tidaknya suatu kegiatan usaha, menentukan komponen utama pendapatan dan apakah komponen itu masih dapat ditingkatkan atau tidak. Kegiatan usaha dikatakan berhasil apabila pendapatannya memenuhi syarat cukup untuk memenuhi semua sarana produksi. Analisis usaha tersebut merupakan keterangan yang rinci tentang penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu tertentu (Aritonang, 1993).

c. Biaya Produksi

Biaya adalah nilai dari semua pengorbanan ekonomis yang diperlukan, yang tidak dapat dihindarkan, dapat diperkirakan, dan dapat diukur untuk menghasilkan suatu produk (Boediono, 1998). Biaya mencakup suatu pengukuran nilai sumberdaya yang harus dikorbankan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan volume kegiatan, biaya dibedakan atas biaya tetap dan biaya tidak tetap (variabel).

commit to user

1) Biaya tetap (*fixed cost*)

Biaya tetap adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi yang jumlah totalnya tetap pada volume kegiatan tertentu seperti depresiasi, asuransi, perbaikan rutin, pajak, dan bunga modal termasuk ke dalam biaya tetap.

2) Biaya variabel (*variable cost*)

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Pengeluaran atau biaya adalah nilai penggunaan secara produksi (*input*) yang diperlukan pada proses produksi. Untuk sarana produksi yang dibeli dimasukkan dalam biaya tunai, sedangkan untuk sarana produksi yang tidak dibeli, dimasukkan dalam biaya diperhitungkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan secara umum di masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyaknya kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak pendapatan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula pada pendapatan.
- c. Keuletan bekerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan bila suatu saat

menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan.

- d. Banyak sedikitnya modal yang dipergunakan, banyak sedikitnya modal yang digunakan seseorang sangat mempengaruhi besar kecilnya modal yang digunakan. Suatu usaha yang besar akan memberi peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Berkaitan dengan pendapatan, besarnya pendapatan pengusaha atau anggota UPPKS yang diperoleh dari hasil produksi dan penjualan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Jumlah produksi

Produksi dalam arti ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan untuk meningkatkan kegunaan atau faedah suatu benda. Kegiatan ini dengan mengubah bentuk atau menghasilkan barang baru (Sriyadi, 1991:6). Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang. Produksi ini merupakan suatu proses kombinasi dan koordinasi materiil dan kekuatan dalam pembuatan suatu barang atau jasa. Besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Semakin besar jumlah produksi maka semakin besar pendapatan yang diperoleh.

- b. Harga jual

Harga adalah satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan (Kotler, 1996:120). Dilihat dari sudut produsen harga mempengaruhi pendapatan dan kelangsungan hidupnya.

Ini berarti bahwa harga dalam hal ini adalah harga jual suatu produk akan mempengaruhi kelangsungan hidup usaha dari produsen. Apabila harga jual produk yang dijual melebihi dari harga yang ada dipasaran maka produk yang dijual tidak akan ada pembelinya atau kalau pun ada tentu tidak sesuai dengan target penjualan. Oleh karena itu maka usaha yang sudah dikelola akan mengalami kemunduran bahkan mungkin akan mati. Sebaliknya jika harga produk yang dijual di bawah harga pasar hanya karena ingin memperoleh banyak pelanggan, akibatnya tidak mendapat untung dan itu pun akan menyebabkan kemunduran usaha karena tidak ada pemasukan atau tidak ada modal. Untuk itu dalam menetapkan harga jual produk harus sesuai dengan harga dipasaran dengan tujuan agar usaha tetap hidup. Harga dilihat dari sudut konsumen adalah merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah produk yang akan dibeli. Bagi konsumen semahal apapun produk tersebut apabila memang merupakan kebutuhan pokok maka akan tetap dibeli, hanya saja jumlah pembelian terbatas. Begitu juga apabila harga produk murah tetapi tidak terlalu penting maka pembeliannya pun juga terbatas sesuai dengan kebutuhan.

c. Volume penjualan

Volume penjualan adalah jumlah barang atau jasa yang terjual dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan unit atau rupiah. Semakin besar volume penjualan, semakin besar pula pendapatan yang

diperoleh. Dengan meningkatnya volume penjualan maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi laba yang diperoleh pengusaha.

d. Modal

Modal dapat diartikan hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut (Riyanto, 1995). Sedangkan modal dalam arti umum mencakup benda-benda seperti tanah, gedung, mesin, alat perkakas dan barang produktif lainnya untuk kegiatan suatu usaha. Menurut Bambang Riyanto modal dibagi menjadi 2 yaitu : modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik usaha dan tertanam untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar, modal tersebut merupakan utang yang harus dibayar. Dalam penelitian ini modal yang digunakan pengusaha untuk menjalankan usahanya berasal dari modal sendiri dan dana dari PNPM-MP.

e. Pemasaran

Pemasaran atau penjualan produk secara garis besar dapat diklasifikasikan secara langsung dan secara tidak langsung. Berkaitan dengan pemasaran, pengusaha atau anggota UPPKS di Kelurahan Balepanjang termasuk pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Daerah pemasaran yang luas akan mempengaruhi volume penjualan. Semakin luas daerah pemasaran akan semakin besar pula volume penjualan.

Beberapa karakteristik sosial yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan para pengusaha yaitu :

commit to user

a. Skala Usaha

Karena modal usaha yang dimiliki relatif kecil, maka unit usahanya pun berada dalam skala yang kecil pula. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dalam usaha ekonomi produktif, misalnya: candak kulak, industri kecil/ rumah tangga, pengembangan jasa pelayanan, perdagangan, dan usaha ekonomi produktif lainnya. Semakin besar skala usaha yang dimiliki pengusaha maka kesempatan untuk memperbesar keuntungan menjadi semakin terbuka.

b. Umur

Semakin tinggi usia seseorang semakin kecil ketergantungannya kepada orang lain atau semakin mandiri. Siswanto (1990) mengemukakan, semakin muda usia (usia produktif 20-45 tahun) umumnya rasa keingintahuan terhadap sesuatu semakin tinggi dan minat untuk mengadopsi terhadap introduksi teknologi semakin tinggi. Pengusaha yang berusia lanjut biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidupnya.

c. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha maka akan semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya akan semakin tinggi pula produktivitas kerja yang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya pendidikan pengusaha maka diharapkan kinerja usaha semakin berkembang. Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah

menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan keterampilan/pendidikan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja (Ahmadi, 2003).

d. Pengalaman usaha

Pengalaman seseorang dalam berusaha berpengaruh terhadap besar kecilnya keuntungan dan pengembangan usaha. Disamping itu juga berpengaruh terhadap penerimaan inovasi dari luar.

e. Motivasi

Menurut Fathoni (2004), kekuatan motivasi dari sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh faktor intrinsik (motivasi yang timbul oleh dorongan yang ditimbulkan dari dalam dirinya) dan lingkungannya. Demikian juga bahwa tanpa ada motivasi dari diri sendiri jelas tipe orang yang sulit untuk diajak bekerja atau berusaha. Jadi orang-orang yang demikian perlu diberikan motivasi atau dorongan sehingga timbul niat untuk bekerja.

f. Jumlah Tanggungan Keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat pula beban hidup yang harus dipenuhi. Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi keputusan dalam berusaha. Keluarga yang memiliki sebidang lahan tetap saja jumlahnya semakin sempit dengan bertambahnya anggota keluarga sementara kebutuhan akan produksi terutama pangan semakin bertambah.

g. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan alat kekuatan fisik dan otak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha produksi. Tenaga kerja berkaitan erat dengan konsep penduduk, dalam hal ini pengertian tenaga kerja adalah semua penduduk usia kerja (15-64 tahun) yakni penduduk yang potensial dapat bekerja dan yang tidak bekerja tetapi siap untuk bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan (Susenas, 2010).

5. Konsep Partisipasi

Partisipasi menyangkut kesamaan dan kesepakatan program dalam struktur pengembangan yang sudah terpadu dan terencana dalam program *community development* yang dibangun secara bersama. Konsep partisipasi mengandung 3 ciri utama :

- a. Adanya kesepakatan yang dijanjikan sebagai pedoman dalam rangka memahami dan mewujudkan tindakan
- b. Adanya tindakan yang didasari oleh kesepakatan
- c. Adanya pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara dalam status dan peran yang harus diwujudkan dalam interaksi sosial yang ada.

Selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dari konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Dengan kondisi ini peran serta masyarakat terbatas pada implementasi atau penerapan program untuk

menjadi kreatif, daya masyarakat tidak dikembangkan dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar, maka partisipasi mencapai bentuk yang pasti (Midgley dalam Moeljarto, 1995).

Konsep partisipasi menumbuhkan daya kreatif dalam dirinya sehingga menghasilkan pola pikir masyarakat yang lebih *genuine*, aktif dan kritis. Seperti yang dikemukakan ".....*participation refers to an active process whereby beneficiaries influence the direction and execution of development project rather than merely receive a share of project benefits*". Keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pembuatan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapi serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Partisipasi juga membantu masyarakat untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka (Paul dalam Moeljarto, 1995).

Menurut Mappadjantji (2005), konsep-konsep dasar pembangunan yang sesuai dengan Sains Baru :

Pertama, naluri setiap manusia adalah mempertahankan keberlangsungan keberadaannya. Aktivitas biologis yang dilakukan oleh makhluk yang paling rendah sampai pada manusia dipicu oleh naluri. Dalam aktivitas kemasyarakatan akan kita temukan bahwa banyak kegiatan sosial, ekonomi, dan politik manusia pada dasarnya juga merupakan perwujudan dari naluri.

Kedua, puncak kebahagiaan manusia adalah berpartisipasi dalam menciptakan dalam menciptakan sesuatu dan menemukan kebahagiaannya jika mereka dapat memberikan kontribusi dalam proses pembaharuan. Sains baru memang menunjukkan bahwa partisipasi merupakan salah satu sifat utama semesta. Semua peristiwa di alam semesta merupakan hasil partisipasi dari semua komponen semesta (prinsip solidaritas). Pada level mikroskopik partisipasi ini terlihat nyata bagaimana partikel-partikel saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan diri mereka (hipotesis *boot strap*). Proses autopoiesis pada makhluk hidup yang diuraikan sebelumnya juga berkaitan erat dengan fenomena partisipasi.

Ketiga, proses merupakan esensi semesta dan bersifat terberi. Proses bersifat *chaotic*, sulit diduga atau diprediksi. Dari perspektif kuantum, perubahan yang dibawa oleh proses merupakan gelombang probabilitas yang bersifat netral, bukan ancaman dan bukan pula peluang. Hal inilah yang menentukan wujud dari probabilitas tersebut.

Kombinasi dari ketiga aspek tersebut mengantarkan kepada pemahaman baru bahwa pembangunan semestinya merupakan serangkaian upaya sadar manusia untuk berpartisipasi menciptakan kebaruan tatanan dan atau lingkungannya dalam kerangka mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya dengan memanfaatkan proses perubahan yang sedang terjadi.

Mappadjantji (2005) juga mengungkapkan keadilan berpartisipasi diwujudkan dalam bentuk ketersediaan berbagai pilihan (*choice*) bagi *commit to user*

masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan budaya, sedang pada sisi lainnya berupa adanya kemandirian masyarakat untuk memilih termasuk menyalurkan aspirasinya. *Choice* dan *Voice* merupakan wujud keadilan yang mendasar, karena masyarakat diberi ruang dan kesempatan sekaligus memiliki kemampuan dan kemandirian untuk memanfaatkan ruang dan kesempatan itu dalam rangka mengembangkan diri dan menyalurkan aspirasi dalam upaya berpartisipasi membangun tatanannya. Hidup dalam tatanan seperti ini akan memberikan makna yang dalam bagi semua kelompok masyarakat, karena mereka dapat menikmati keberadaan mereka di dalam tatanannya.

Selanjutnya Dwiyanto (2004), menyebutkan tiga dimensi yang menjadi ciri *governance* :

- a. Dimensi kelembagaan di mana sistem administrasi dilaksanakan dengan melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*) baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah
- b. Dimensi nilai yang menjadi dasar tindakan administrasi lebih kompleks dari sekedar pencapaian efisiensi dan efektivitas namun lebih mengakomodir nilai-nilai universal seperti keadilan, partisipasi, kesetaraan, demokrasi dan nilai-nilai lain yang terkandung dalam norma kehidupan masyarakat
- c. Dimensi proses, di mana proses administrasi merupakan suatu tindakan bersama yang dikembangkan dalam bentuk jaringan kerja untuk merespon tuntutan dan kebutuhan publik melalui upaya formulasi dan implementasi kebijakan publik.

Wibawa (1994), menekankan konsep *governance* pada pelaksanaan fungsi memerintah (*governing*) yang dilaksanakan secara bersama-sama (*kolaboratif*) oleh lembaga pemerintah, semi pemerintah dan non-pemerintah seperti LSM dan institusi swasta maupun warga negara yang berlangsung setara (*balance*) dan multi arah (*partisipatif*). Kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Lebih jauh disebutkan bahwa dalam proses *governance* tersebut institusi non pemerintah dapat saja memegang peran yang lebih dominan, atau malah lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun "*governance without government*".

Konsep *governance* yang mensyaratkan partisipasi dalam keseluruhan proses formulasi dan implementasi mengakibatkan sistem administrasi itu sendiri menjadi sangat kompleks yang termanifestasi melalui keragaman partisipan/ stakeholders, perspektif, situasi, nilai dan strategi serta hasil dan efek aktual yang mereka inginkan.

Nilai dan interest korporasi misalnya akan sangat dikotomis dengan nilai dan interest masyarakat lokal di lingkungan operasionalnya, demikian juga tentunya nilai dan interest pemerintah yang menjadi otoritasnya. Tuntutan masyarakat atas tanggungjawab sosial perusahaan tentunya akan direspon oleh perusahaan berdasarkan nilai dan interestnya sebagai lembaga korporasi, sedangkan pemerintah sendiri akan melihat interaksi tersebut berdasarkan nilai dan kepentingannya terhadap masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

Dalam perspektif *welfare state* pemerintah seringkali mengalami dilema dalam implementasi pelayanan kesejahteraan masyarakatnya ketika negara
commit to user

sedang mengalami krisis. Di satu sisi angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi menuntut perhatian lebih bagi kesejahteraan masyarakat sementara di sisi lain dimensi pertumbuhan ekonomi yang berjalan sangat lamban sudah sangat membebani pemerintah.

Parsons (2005) menyebutkan bahwa dalam masyarakat demokratis warga negara menghadapi banyak agen yang bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik yang membuka jalan bagi terbentuknya suatu model penyampaian kebijakan yang berbasis kemitraan baru antara sektor publik dan privat, mekanisme pasar dan kebijakan publik yang *marketized* serta peran baru untuk sektor sukarela dan komunitas. Dengan kata lain model implementasi kebijakan yang melibatkan sejumlah besar stakeholders sebagaimana dikutip dari pernyataan Self, "Penyediaan layanan kesejahteraan dapat dianggap sebagai campuran kompleks dari kontribusi-kontribusi dari empat besar sumber : pemerintah, pasar, organisasi sukarela dan rumah tangga individual".

6. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dapat ditinjau dari perspektif pembangunan berdasarkan indikator kesejahteraan yang ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan. Maka dengan asumsi-asumsi pembangunan yang ada yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (*equal*
commit to user)

productivity) dan masing-masing pelaku bertindak rasional (*efficient*) dapat terpenuhi.

Menurut Suharto (2005), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, dan cara-cara pemberdayaan. Maka sebagai suatu proses pemberdayaan adalah serangkaian kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memebuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan yaitu masyarakat berdaya (mempunyai kemampuan). Kemampuan di sini meliputi aspek fisik dan material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam membentuk wadah/ kelompok), dan kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual (meningkatnya sumberdaya manusia) dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pelaksanaan pembangunan nasional ada tiga pertanyaan dasar yang perlu dijawab yaitu, pertama pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur. Kedua, pembangunan perlu diletakkan pada arah

commit to user

pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ketiga, pembangunan perlu diletakkan pada arah koordinasi lintas sektoral, pembangunan antar daerah dan pembangunan khusus yang semuanya dilaksanakan secara terpadu, terarah dan sistematis (Dwidjowijoto, 2000).

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik (Todaro, 2004:17). Pendapat ini didukung oleh Meier (1995), yang memandang bahwa pembangunan ekonomi dimaknai sebagai proses terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dengan didasarkan pada tidak meningkatnya jumlah kemiskinan absolut dan distribusi pendapatan yang tidak memburuk dalam jangka panjang perlu ditekankan karena apa yang menjadi titik perhatian utama dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan riil masyarakat yang terus menerus (*sustained*) dalam jangka panjang.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah *commit to user*

gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan dan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat serta pada tingkat yang lebih luas adalah gejala kegagalan dan harapan. Maka pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual (Friedmann, 1992).

Pemberdayaan (*empowerment*) sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas sebab masyarakat sipil (*civil society*) akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal dan sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar masyarakat sipil (*civil society*) diabaikan (Hall dalam Friedmann, 1992).

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan hasil kerja proses interaktif baik pada tataran ideologis maupun pada tataran implementasinya. Pada tataran ideologis konsep *empowerment* merupakan hasil interaksi antar konsep *top down* dan *bottom up* antar *growth strategy* and *people centered strategy* dan pada tataran implementasi interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi (Friedman, 1992). Konsep pemberdayaan

sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling berkaitan. Masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan dan pihak yang mempunyai kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1998). Pemberdayaan merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggungjawab secara penuh (Adimihardja, 2001).

7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

a. Gambaran Umum PNPM-MP

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

b. Tujuan PNPM-MP

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi :

- 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

c. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

commit to user

Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi :

- 1) Bertumpu pada pengembangan manusia
- 2) Otonomi
- 3) Desentralisasi
- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin
- 5) Partisipasi
- 6) Kesenjangan dan Keadilan Gender
- 7) Demokratis
- 8) Transparansi dan Akuntabel
- 9) Prioritas
- 10) Keberlanjutan

d. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi :

1) Desa Berpartisipasi

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan-kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan

commit to user

pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa tertinggal akan mendapat prioritas didanai. Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada besar/volume kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara otomatis kepada desa-desa tertinggal sama sekali tidak diinginkan, karena setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya secara teknis maupun manfaat sosial ekonominya.

2) Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a) Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal,
- b) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- c) Dapat dikerjakan oleh masyarakat dan
- d) Didukung oleh sumber daya yang ada.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM
- b) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal)

- c) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal
- d) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

3) Mekanisme Usulan Kegiatan

Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah :

- a) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan
- b) Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok
- c) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan. Jika usulan non-SPP dari musyawarah

khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta.

4) Kesenjangan dan Keadilan Gender

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.

5) Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan lokal menuju kemandirian, maka :

- a) Di setiap desa dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K dengan kualifikasi teknik dan pemberdayaan), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara

- b) Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Tim Verifikasi, UPK, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL)
- c) Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan di antaranya meliputi : penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif.
- d) Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PPK di desa dan kecamatan. Kategorisasi meliputi tahapan pembentukan dan tahapan pengakaran. Tahap pembentukan untuk mengetahui hubungan antara dinamika kolektivitas dan strategi pendampingan, sedangkan tahap pengakaran untuk mengetahui dinamika kolektivitas dan *statute*.
- e) Dilakukan penataan dan pengembangan Kelembagaan Desa serta Antar Desa Organisasi kerja yang dibangun melalui PPK, pada awalnya adalah lembaga-lembaga di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam PNPM-MP, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang akan dikerjakan melalui PNPM-MP. Untuk mencapai
- commit to user*

kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada. Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek *statute* dan payung hukum. *Statute* menuntaskan status hak milik, keterwakilan dalam delegasi, serta batas kewenangan.

6) Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

Masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan pendampingan dari fasilitator. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan secara mandiri di wilayahnya. Fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal disediakan Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT) di setiap Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maka dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno yang berdiri mulai September 2003. program dari pemerintah pusat tersebut telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun sedangkan di wilayah Kabupaten Wonogiri pada umumnya dan Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno khususnya program ini berjalan tujuh tahun. Perubahan yang terjadi ternyata tidak hanya di level UPK akan tetapi dari tingkat pusat juga mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah yang dulu program ini bernama PPK

mulai April 2007 sebutan PPK sudah diganti menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan bagian dari piranti pemberdayaan serta berfungsi sebagai lembaga sosial dan ekonomi, sehingga UPK mempunyai peran mengawal jalannya proses PNPM-MP. UPK juga mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi yaitu mengelola dana bergulir yang berasal dari program PPK, PNPM-PPK dan PNPM-MP dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada tujuan dan prinsip program. Sedangkan sebagian dari hasil usaha yang dilakukan dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Walaupun program mengalami perubahan nama akan tetapi keberadaan UPK mutlak diperlukan. Keberadaan serta keberlanjutan kegiatan UPK akan ditentukan beberapa faktor diantaranya keberadaan kelompok-kelompok pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang kuat. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh UPK Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno untuk memperkuat keberadaan kelompok-kelompok tersebut adalah mulai dari tahapan sosialisasi, proses verifikasi, pembinaan peningkatan kapasitas kelompok dan mengidentifikasi masalah-masalah sehingga dapat dicarikan solusi untuk memecahkan masalah (*problem solving*) secara bersama-sama.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmais (2009), yang meneliti tentang evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan masyarakat nelayan di Kabupaten Natuna dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, dan lebih bersifat evaluasi sumatif, menggunakan desain deskriptif kualitatif, dengan metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah fasilitator PNPM Perdesaan, koordinator pengelola PNPM Perdesaan, dan perwakilan dari keluarga nelayan. Hasil penelitian menunjukkan, Program PNPM Perdesaan di Kabupaten Natuna telah diusahakan untuk sedapat mungkin terlaksana sesuai prosedur ketentuan program, walaupun terdapat beberapa kendala bagi pelaksanaannya.

Dampak program, secara kualitatif tampak bagus dari sisi; keterlibatan dan partisipasi masyarakat, kaum perempuan, dan persepsi mereka terhadap peningkatan taraf hidup mereka. Namun dampak terhadap kesejahteraan secara kuantitatif sulit ditentukan, mengingat PNPM Perdesaan hanyalah salah satu komponen pembangunan disamping program-program lain yang dilakukan pemerintah melalui departemen-departemen terkait. Sementara persepsi juga menunjukkan, bagi masyarakat nelayan belum sepenuhnya terlihat, karena PNPM Perdesaan cenderung digunakan untuk membangun fasilitas umum.

Efektifitas program PNPM Perdesaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: program telah dikomunikasikan dengan baik, program mendapat dukungan sumber-sumber kebijakan semestinya; fasilitas dan personil serta dana, pelaksana program memiliki sikap positif untuk mensukseskan program.

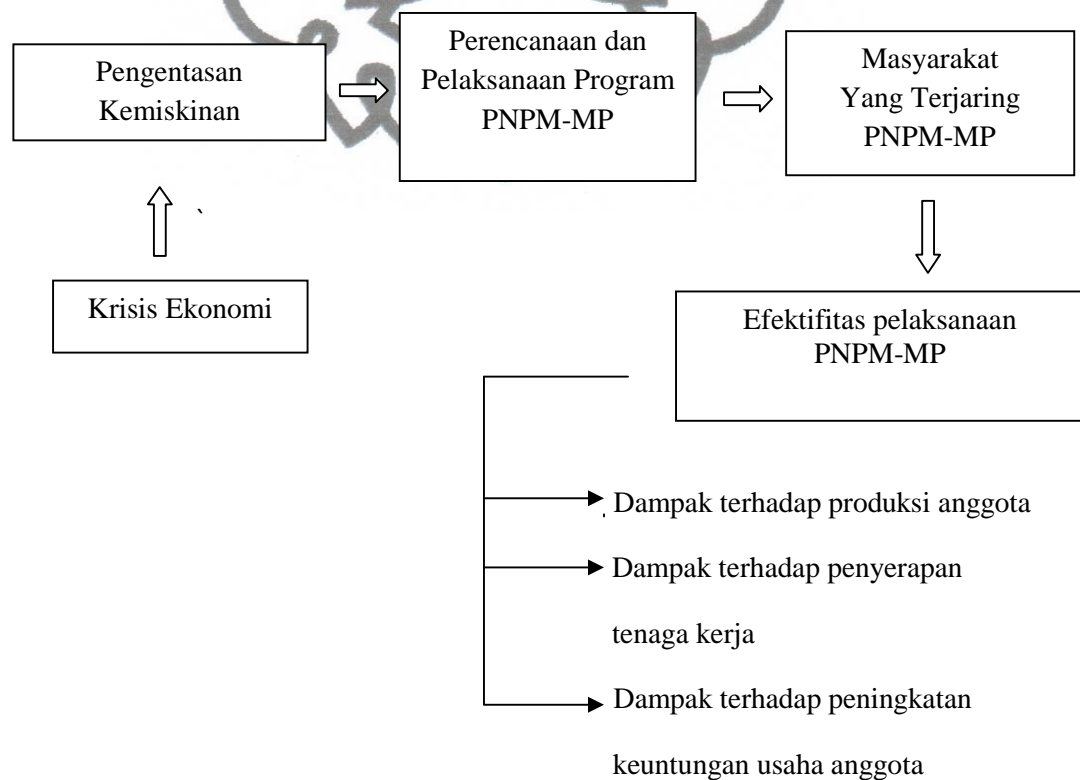
Dwana (2009) dalam penelitiannya mengenai evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap pengembangan sosio-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir mengetengahkan evaluasi pelaksanaan program, analisis dampak kondisi sosio-ekonomi dan analisis antara masyarakat yang menerima bantuan dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Analisis dikerjakan dengan menggunakan analisis diskriptif dan analisis uji beda rata-rata (*compare-mean*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Balige belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Dampak PNPM-MP terhadap kondisi sosio-ekonomi pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda nyata secara positif. Dengan adanya program PNPM-MP di Kecamatan Balige mampu menciptakan peluang kerja kepada masyarakat.

Twidaryati (2010) dalam penelitiannya tentang analisis ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen mengetengahkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui profil, dampak program dan pengaruh PNPM-MP

dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS. Sampel didapatkan 60 responden dengan teknik random sampling dan analisis data digunakan uji beda rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM-MP di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen mayoritas adalah perempuan dengan pendidikan yang masih rendah yaitu SLTP dan adanya perbedaan jumlah tenaga kerja, produktivitas dan penghasilan anggota kelompok UPPKS di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sebelum dengan setelah adanya PNPM-MP.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah menambah jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Perkotaan, PNPM Perdesaan dan Mandiri di Wilayah khusus dan daerah tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan sehingga tercipta penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan kerangka berfikir seperti di atas, maka diharapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak PNPM-MP terhadap tingkat produksi anggota, penyerapan tenaga kerja, dan keuntungan usaha yang diperoleh anggota dapat dihasilkan analisis yang komprehensif dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Diduga Program PNPM-MP mampu meningkatkan produksi anggota UPPKS.
- 2) Diduga Program PNPM-MP mampu meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja.
- 3) Diduga Program PNPM-MP mampu meningkatkan keuntungan usaha anggota UPPKS.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan sensus mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri terhadap masyarakat penerima dana PNPM-MP (anggota UPPKS) yang berjumlah 35 KK. Tiap anggota kelompok mendapatkan dana bervariasi antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00. Dalam penelitian ini, karena mengingat jumlah populasi diketahui sangat sedikit maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sensus* yaitu dengan teknik sampling secara keseluruhan populasi diambil menjadi sampel, sehingga jumlah sampel berjumlah 35 responden.

B. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada anggota UPPKS penerima bantuan dana bergulir PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno, dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer yang diambil dari para anggota melalui wawancara langsung dengan angket/kuesioner dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi data hasil laporan tertulis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Jatipurno, Kelurahan Balepanjang,

administrasi kelompok UPPKS, UPK PNPM-MP dan buku-buku penunjang lainnya.

C. Analisis Data

Untuk mengetahui dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebelum dan sesudah menerima dana PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno dilakukan analisis deskriptif dengan membandingkan sebelum dan sesudah menerima bantuan yang selanjutnya dijelaskan dari tingkat produksi anggota, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan usaha yang diterima.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini didefinisi operasionalkan sebagai berikut :

1. Tingkat produksi anggota diukur dengan jumlah persentase kenaikan produksi dari sebelum dan sesudah penerimaan dana PNPM-MP. Penggunaan persentase kenaikan karena satuan yang digunakan sebagai ukuran peningkatan produksi untuk tiap usaha adalah berbeda-beda.
2. Penyerapan tenaga kerja dalam menjalankan usaha membutuhkan tenaga kerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja dihitung dari jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses kegiatan

usahnya. Tenaga kerja diukur dengan jumlah kenaikan tenaga kerja (satuan orang) dari sebelum dan sesudah penerimaan dana PNPM-MP.

3. Keuntungan usaha yang diperoleh anggota dengan jumlah kenaikan pendapatan (satuan rupiah) dari sebelum dan sesudah penerimaan dana PNPM-MP..



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Wilayah Kabupaten Wonogiri secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan, 43 kelurahan dan 251 desa yang luas wilayahnya mencapai 182.236,02 ha. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang diapit oleh Propinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan registrasi tahun 2010 sebanyak 1.245.923 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 625.901 jiwa dan perempuan 620.022 jiwa yang tersebar di 25 wilayah kecamatan. Jika dilihat dari mata pencahariannya, jumlah terbesar penduduk Kabupaten Wonogiri masih menggantungkan hidupnya dari bertani yang sebagian besarnya juga sebagai peternak meski dengan skala usaha kecil yang mencapai 372.452 orang atau 30,16%.

Kecamatan Jatipurno merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri.dengan kondisi topografi berupa perbukitan yang terletak terletak diantara : $7^{\circ}32' - 8^{\circ}15' \text{ LS}$ dan $110^{\circ}41' - 111^{\circ}8'$. Luas Kecamatan Jatipurno adalah 5.546,409 ha. Tanah di Kecamatan Jatipurno adalah tanah latosol.

Kecamatan Jatipurno memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

sebelah barat : Kecamatan Girimarto
sebelah timur : Kecamatan Slogohimo
sebelah utara : Kabupaten Karanganyar
sebelah selatan : Kecamatan Jatisrono

Secara umum daerah ini beriklim tropis, mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau dengan temperatur rata-rata berkisar $22-29^{\circ}\text{C}$, dan masuk dalam golongan iklim D (Schmidt dan Ferguson) dengan nilai $Q = 0,53$ ($0,33 < Q \leq 0,60 = \text{iklim C}$). Luas wilayah Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri terbesar di Desa Girimulyo yaitu 1.230,90 ha atau 22,20 % dari total seluruh wilayah Kecamatan Jatipurno. Penggunaan tanah pada Kecamatan Jatipurno terbesar digunakan sebagai tanah dan bangunan yaitu 1.771 ha sedangkan untuk padang rumput luas areal paling rendah yaitu 10 ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penduduk sangat besar dilihat dari tingginya penggunaan luas tanah untuk tanah dan bangunan serta halaman.

Keadaan Geografis Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno menurut batas wilayah adalah :

sebelah utara : Hutan
sebelah selatan : Kelurahan Jatipurno
sebelah barat : Desa Jeporo
sebelah timur : Desa Girimulyo dan Desa Tawangrejo

Dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 561 m, jenis tanah latosol. Adapun orbitasi pusat pemerintahan 2 km, jarak pusat pemerintahan

Kecamatan 2,5 Km, jarak pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri 38 Km, jarak pusat pemerintahan propinsi 172 km. Kelurahan Balepanjang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri mempunyai luas wilayah 442,639 ha terdiri 5 RW dan 20 RT dengan jumlah penduduk berdasarkan registrasi tahun 2010 sebanyak 4.042 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.045 jiwa dan perempuan 1.997 jiwa.

Penduduk berdasarkan mata pencaharian terbesar yaitu sektor lain-lain sebanyak 2.434 orang (66%) dan pertanian sebanyak 812 orang (21 %). Penggunaan lahan di Kelurahan Balepanjang tertinggi pada penggunaan untuk tanah dan bangunan serta halaman yaitu seluas 182,15 ha (41,10%) dari luas wilayah Kelurahan Balepanjang, dan luas lahan yang digunakan untuk padang rumput merupakan penggunaan lahan terendah yaitu 4,00 ha (0,90 % dari luas wilayah Kelurahan Balepanjang) terkecil. Hal tersebut menandakan bahwa semakin sempitnya lahan pertanian karena bertambahnya jumlah penduduk sehingga banyak lahan yang digunakan untuk perumahan (bangunan).

2. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Wonogiri dilaksanakan mulai tahun 2004, yang pada waktu itu masih bernama P2KP yang dilaksanakan pada 11 kecamatan yang kemudian disebut sebagai lokasi lama. Mulai tahun 2007, kegiatan P2KP diganti menjadi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan berada dalam satu payung program PNPM Mandiri. Pada tahun 2007 lokasi kecamatan penerima program PNPM Mandiri Perdesaan di

Kabupaten Wonogiri ditambah sebanyak 23 kecamatan, yang selanjutnya disebut dengan istilah lokasi baru 2007.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di wilayah Kabupaten Wonogiri pada umumnya dan Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno khususnya program ini berjalan empat tahun. Perubahan yang terjadi ternyata tidak hanya di level UPK akan tetapi dari tingkat pusat juga mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah yang dulu program ini bernama PPK mulai April 2007 sebutan PPK sudah diganti menjadi PNPM-MP. UPK juga mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi yaitu mengelola dana bergulir yang berasal dari program PPK, PNPM-PPK dan PNPM-MP dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada tujuan dan prinsip program. Sedangkan sebagian dari hasil usaha yang dilakukan dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Kegiatan siklus PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Balepanjang bisa dikatakan telah terlaksana semua, karena sampai saat ini telah memasuki siklus tahun kedua atau tahapan bantuan langsung masyarakat tahap kedua. Siklus yang telah dilaksanakan dimulai dari sosialisasi awal, perekrutan relawan, pemetaan swadaya, refleksi kemiskinan, pembentukan BKM, penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanganan Kemiskinan (PJM Pronangkis), pelatihan-pelatihan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lapangan. Kegiatan fisik lingkungan pada program PNPM Mandiri Perdesaan yang di Kelurahan Balepanjang baik yang sudah dilaksanakan atau sudah direncanakan adalah

pengaspalan jalan lingkungan, pembangunan MCK, pembuatan saluran drainase, reklamasi tanah, pendirian klinik desa, pembangunan irigasi pertanian, penyediaan air bersih, pavingisasi jalan lingkungan, pembuatan senderan jalan, penerangan jalan dan penataan sanitasi lingkungan. Kegiatan dalam bidang ekonomi yaitu pengelolaan dana bergilir untuk kepentingan usaha kecil dan mikro dan untuk kepentingan warga miskin. Kegiatan dalam bidang sosial yang telah dilaksanakan dan masih dalam perencanaan adalah pelatihan kerajinan batu, pelatihan pembuatan besi kolom, penyewaan layos, khitanan massal, penyuluhan penanggulangan narkoba, penyuluhan kesehatan ibu hamil, penyuluhan KB, *Fogging* untuk pemberantasan penyakit demam berdarah, penyediaan pupuk untuk petani, pelayanan pengobatan gratis, pendirian program paket B dan C, kursus komputer, beasiswa bagi anak kurang mampu, dan pendirian perpustakaan desa.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno di Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan dana bantuan modal bergilir dari PNPM-MP atau sering disebut dengan anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Anggota UPPKS sebagai pengelola, merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan usaha. Karakteristik sosial anggota UPPKS yang diurai meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jumlah

tanggungan keluarga, jenis usaha, dana yang diperoleh dan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan.

Hasil pengumpulan data dari 35 responden anggota UPPKS di Kelurahan Balepanjang tersebut, dapat disajikan karakteristik responden sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Responden anggota UPPKS yang melakukan kegiatan usaha kecil dan menengah sebagian besarnya berjenis kelamin perempuan sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebagian kecilnya. Secara terinci sebaran jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	5	14,29
2.	Perempuan	30	85,71
Jumlah		35	100,0

Sumber : Data diolah, 2011

Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (85,71%) dan laki-laki sebesar 14,29%, pada kondisi ini umumnya perempuan lebih bersifat tekun dan teliti dalam perhitungan rugi laba dalam usahanya membantu perekonomian keluarga.

2. Umur Responden

Responden anggota kelompok UPPKS yang melakukan kegiatan usaha mempunyai umur terendah 30 tahun dan umur tertinggi 62 tahun. Sebagian besar responden berada pada usia kerja produktif (30 – 50 tahun) sedangkan rata-rata umur responden adalah 43,9 tahun. Secara terinci sebaran umur responden dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	30 – 34	2	5,71
2.	35 – 39	7	20,00
3.	40 – 44	8	22,86
4.	45 – 49	9	25,71
5.	50 – 54	7	20,00
6.	≥ 55	2	5,71
Jumlah		35	100,0

Sumber : Data diolah, 2011

Sebagian besar responden berada dalam usia produktif yakni antara 30-49 tahun (74,29%), pada kondisi ini umumnya anggota UPPKS masih mempunyai kemampuan fisik dan berfikir yang lebih baik dalam hal menghadapi dan menerima keadaan, serta hal-hal yang baru bila dibandingkan dengan umur yang lebih tua. Menurut Rasyaf (1995), bahwa umur antara 20–55 tahun merupakan umur yang masih produktif, sedangkan di bawah 20 tahun merupakan umur yang belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai usia sekolah sedangkan umur di atas 55 tahun tingkat produksinya telah melewati titik optimal dan akan menurun sejalan dengan

pertambahan umur. Kenyataan ini tentunya akan sangat berpengaruh pada tingkat produksi anggota UPPKS dan sangat mendukung dalam pengembangan usaha pengentasan kemiskinan di Kelurahan Balepanjang.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota kelompok berkaitan dengan pola pemikiran dan sistem kerja. Hubungan antara tingkat pendidikan formal signifikan dengan kemampuan anggota dalam pengembangan usaha. Begitu juga pendidikan non formal biasanya dapat membantu peningkatan pola berpikir dan keterampilan teknis. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	2	5,71
2.	SD	9	25,71
3.	SLTP	15	42,86
4.	SLTA	9	25,71
Jumlah		35	100,0

Sumber : Data diolah, 2011

Tingkat pendidikan anggota UPPKS di Kelurahan Balepanjang tergolong cukup bagus yaitu sebagian besar atau 68,57% berpendidikan SLTP ke atas, hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan anggota dalam mengelola usaha yang dijalankan, terutama sikap dan pola pikir. Pendidikan merupakan faktor pelancar yang dapat mempercepat pengembangan usaha,

dengan pendidikan yang baik seorang anggota akan mudah mengadopsi teknologi baru, mengembangkan keterampilan dan memecahkan masalah yang ditemui. Hal ini sesuai dengan Martono (1995) bahwa tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir serta kemampuan seseorang dalam mengelola suatu usaha serta dapat mengubah serta menerima setiap perubahan yang ada serta bagaimana menerapkannya.

4. Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usaha yang dimiliki oleh anggota UPPKS penerima dana PNPM ditunjukkan pada Tabel 4.4. Mayoritas responden memanfaatkan dana PNPM untuk mengembangkan usaha perdagangan seperti warung kelontong, dagang sayur dan jual sembako sebanyak 16 (45,71%) responden. Responden yang memanfaatkan untuk mengembangkan usaha di sektor jasa seperti menjahit hanya 1 orang (2,86%) sedangkan industri rumah tangga/ home industri seperti pembuatan kerupuk, sistik, pangsit, keripik singkong dan tempe sebanyak 18 (51,43%) responden. Sebaran responden berdasarkan jenis usaha masing-masing disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Jasa	1	2,86
2.	Perdagangan	16	45,71
3.	Home industri	18	51,43
Jumlah		35	100,0

Sumber : Data diolah, 2011

Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis usaha yang dimiliki oleh anggota belum terlalu bervariasi, hal ini disebabkan karena usaha yang dimiliki sudah berjalan dan anggota hanya sebatas menambah volume produksi dan pemasaran. Jadi dalam hal pengalaman usaha dan kreativitas anggota akan sangat menentukan perkembangan usahanya di kemudian hari.

5. Jumlah Tanggungan Keluarga

Soekartawi *et all* (1986) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga merupakan beban disatu sisi, akan tetapi bila dilihat dari sisi lain merupakan sumber tenaga kerja. Sebaran responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga masing-masing disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

No	Jumlah tanggungan keluarga (Jiwa)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	2	2	5,71
2.	3	8	25,71
3.	4	17	48,57
4.	5	7	20,00
Jumlah		35	100,0

Sumber : Data diolah, 2011

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden pada daerah penelitian sebagian besar terdiri dari empat orang (48,57%) atau rata-rata jumlah tanggungan keluarga 3,83 orang. Keadaan ini akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja keluarga sehingga untuk ukuran skala usaha kecil tidak perlu menyewa tenaga kerja.

6. Besarnya dana yang diterima

Distribusi responden menurut jumlah dana PNPM-MP yang diterima oleh anggota UPPKS menunjukkan besarnya rata-rata pinjaman dana sebesar Rp. 814.286,00. Sebaran responden berdasarkan besarnya dana yang diterima oleh anggota disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Besarnya Dana PNPM yang Diterima

No	Jumlah dana yang diterima (rupiah)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	500.000	19	54,29
2.	1.000.000	13	37,14
3.	2.000.000	3	8,57
Jumlah		35	100,00

Sumber : Data diolah, 2011

Jumlah dana yang akan diterima mempengaruhi perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota sehingga akan berakibat terhadap omzet penjualan atau penghasilan. Hasil penelitian terhadap jumlah dana PNPM yang diterima oleh anggota UPPKS bervariasi antara Rp 500.000,00 dan Rp 2.000.000,00 oleh masing-masing anggota dimanfaatkan untuk menambah modal dalam mengembangkan usaha. Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa sebagian besar anggota mendapatkan pinjaman dana Rp. 500.000,00 sebanyak 19 (54,29%) responden dan 13 (37,14%) responden dengan pinjaman Rp 1.000.000,00. Pinjaman dengan nilai Rp. 2.000.000,00 hanya didapatkan oleh 3 (8,57%) responden. Dari jumlah dana yang diterima dapat

diambil kesimpulan bahwa skala usaha anggota UPPKS masih tergolong usaha mikro.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Produksi

Produksi yang diukur adalah persentase kenaikan produksi dari sebelum dan sesudah penerimaan dana PNPM. Penggunaan persentase kenaikan karena satuan yang digunakan sebagai ukuran peningkatan produksi untuk tiap usaha adalah berbeda-beda. Hasil penghitungan persentase kenaikan produksi sesudah penerimaan dana PNPM ditunjukkan Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Persentase Produksi Sebelum dan Sesudah Penerimaan Dana PNPM

Produksi	Produksi Sebelum PNPM	Produksi Sesudah PNPM
N	35	35
Rata-rata	100,00	193,68
Standar Deviasi	0,00	74,44
Minimum	100,00	120,00
Maksimum	100,00	400,00
Jumlah	3500,00	6779,00

Sumber : Data diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rata-rata produksi usaha anggota kelompok UPPKS mengalami kenaikan 93,68% sebelum dan sesudah menerima dana PNPM. Sedangkan persentase produksi minimum

dan maksimum sebelum penerimaan PNPM adalah sama yaitu 100, tetapi sesudah diterimanya dana PNPM persentase minimum dan maksimum masing-masing adalah 120 dan 400. Terdapat peningkatan produksi anggota UPPKS yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP.

Adanya kenaikan produksi menunjukkan bahwa produksi anggota UPPKS meningkat sesudah mendapatkan dana PNPM-MP dibandingkan sebelum mendapatkan dana PNPM-MP. Dengan demikian hipotesis I terbukti. Dapat ditarik kesimpulan di mana rata-rata produksi sebelum adanya dana PNPM adalah masih 100,0%. Namun sesudah adanya penerimaan dana PNPM, maka rata-rata produksi anggota UPPKS mampu menjadi 193,68%. Semakin besar jumlah produksi yang dilakukan oleh anggota maka semakin besar pula jumlah pendapatan atau produksi anggota UPPKS. Kasus di atas juga ditunjukkan oleh penelitian dari Dwana (2009) yang menyatakan bahwa dampak sosio-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda secara positif. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Twidaryati (2010) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata terhadap produksi setelah adanya PNPM-MP di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

2. Tenaga Kerja

Tabel 4.8 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam melakukan usaha sebelum dan sesudah ada program PNPM-MP di

commit to user

Kelurahan Balepanjang. Dari tabel terlihat bahwa usaha anggota kelompok UPPKS mengalami peningkatan sebelum dan sesudah program PNPM-MP dalam rangka menyerap tenaga kerja baru meskipun kenaikannya masih sangat kecil.

Tabel 4.8 Persentase Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Penerimaan Dana PNPM

Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Sebelum PNPM	Tenaga Kerja Sesudah PNPM
N	35	35
Rata-rata	1,57	1,94
Standar Deviasi	0,61	0,87
Minimum	1,00	1,00
Maksimum	3,00	4,00
Jumlah	55,00	68,00

Sumber : Data diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah tenaga kerja dari usaha anggota kelompok UPPKS mengalami kenaikan 37,15% sebelum dan sesudah menerima dana PNPM. Jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat dari 55 orang menjadi 68 orang atau meningkat 13 tenaga kerja baru yang dapat diserap. Terdapat peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya dana PNPM-MP. Dengan persentase kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 23,64% sesudah adanya PNPM-MP.

Adanya kenaikan jumlah tenaga kerja menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terhadap jalannya usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS meningkat sesudah mendapatkan dana PNPM-MP

dibandingkan sebelum mendapatkan dana PNPM-MP. Dengan demikian hipotesis II terbukti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata tenaga kerja sebelum adanya dana PNPM adalah masih 1,5714. Namun sesudah adanya penerimaan dana PNPM, maka rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja terhadap usaha anggota UPPKS mampu menjadi 1,9429. Hal ini menunjukkan bahwa adanya program PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang mampu menciptakan peluang kerja baru kepada masyarakat sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Kasus di atas juga ditunjukkan oleh penelitian dari Dwana (2009) yang menyatakan bahwa dampak sosio-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda secara positif dalam hal penyerapan tenaga kerja di masyarakat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Twidaryati (2010) bahwa terdapat perbedaan yang nyata terhadap jumlah tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan setelah adanya PNPM-MP di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

3. Keuntungan Usaha

Tabel 4.9 menunjukkan hasil tiap bulan yang didapat anggota kelompok UPPKS dalam menjalankan usahanya sebelum dan sesudah ada program PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno. Dari tabel terlihat bahwa usaha anggota kelompok UPPKS mengalami peningkatan keuntungan usaha sebelum dan sesudah adanya program PNPM-MP.

Tabel 4.9 Persentase Keuntungan Usaha Sebelum dan Sesudah
Penerimaan Dana PNPM

Keuntungan Usaha	Keuntungan usaha Sebelum PNPM	Keuntungan usaha Sesudah PNPM
N	35	35
Rata-rata	708.571,43	1.141.428,57
Standar Deviasi	352.873,85	451.384,42
Minimum	275.000,00	500.000,00
Maksimum	1.500.000,00	2.000.000,00
Jumlah	24.800.000,00	39.950.000,00

Sumber : Data diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa rata-rata keuntungan usaha anggota kelompok UPPKS mengalami kenaikan sebesar Rp. 432.857,14 sebelum dan sesudah menerima dana PNPM. Sedangkan pendapatan minimum dan maksimum sebelum penerimaan PNPM adalah Rp. 275.000,00 sampai dengan Rp. 1.500.000,00 dan masa sesudah menerima PNPM yaitu antara Rp. 500.000,00 – Rp. 2.000.000,00.

Terdapat peningkatan keuntungan usaha yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP. Dengan persentase kenaikan pendapatan sebesar 61,09% sesudah adanya PNPM-MP. Berdasarkan tingkat pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan anggota UPPKS meningkat sesudah mendapatkan dana PNPM-MP dibandingkan sebelum mendapatkan dana PNPM-MP. Dengan demikian hipotesis III terbukti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata pendapatan sebelum adanya dana PNPM adalah masih Rp. 708.571,43.

Namun sesudah adanya penerimaan dana PNPM, maka rata-rata pendapatan anggota UPPKS mampu mencapai Rp. 1.141.428,57. Tingkat pendapatan anggota UPPKS yang mengalami trend positif menunjukkan tercapainya tujuan dari penerimaan dana bergulir yang dilakukan sebagai program PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno. Kasus di atas juga ditunjukkan oleh penelitian dari Dwana (2009) yang menyatakan bahwa dampak sosio-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP berbeda secara positif. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Twidaryati (2010) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata terhadap pendapatan setelah adanya PNPM-MP di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap tingkat produktivitas anggota UPPKS sesudah menerima dana PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno lebih baik dibandingkan sebelum menerima dana PNPM-MP dengan rata-rata kenaikan produksi sebesar 93,68%.
2. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha anggota UPPKS sesudah menerima dana PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno lebih baik dibandingkan sebelum menerima dana PNPM-MP dengan kecenderungan penyerapan tenaga kerja baru yang meningkat dengan persentase rata-rata 23,64%.
3. Tingkat keuntungan usaha anggota kelompok UPPKS sesudah menerima dana PNPM-MP di Kelurahan Balepanjang Kecamatan Jatipurno lebih baik dibandingkan sebelum menerima dana PNPM-MP dengan kecenderungan peningkatan keuntungan usaha yang diterima oleh anggota UPPKS dengan persentase rata-rata 61,09%.

B. Saran

1. Dengan adanya dampak yang positif dan lebih baiknya tingkat produksi, penyerapan tenaga kerja baru serta keuntungan usaha yang diterima oleh para anggota UPPKS sesudah menerima bantuan dana bergulir PNPM-MP oleh karena itu perlu diperbanyak jenis bantuan untuk keluarga miskin yang menunjang produktivitas baik penambahan besarnya modal atau penerimaan anggota UPPKS yang baru.
2. Pemerintah dan tim fasilitator perlu memfasilitasi terbentuknya *channeling* dan jaringan kerja yang lebih luas antar semua *stakeholder* pembangunan untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat serta agar anggota dapat mengembangkan usahanya.
3. Kepengurusan UPPKS dapat mengembangkan kemitraan baik dalam membantu permodalan di luar bantuan pemerintah seperti dari Lembaga Keuangan atau menjalin kemitraan yang dapat menampung dan memasarkan hasil usaha dari anggota.